

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, BUDAYA ORGANISASI, *GOOD GOVERNANCE*, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN *FRAUD* PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN SAMOSIR

¹Duma Megaria Elisabeth, Universitas Methodist Indonesia

email : duma0803@yahoo.com

²Erisa Antheresya Butar Butar, Universitas Methodist Indonesia

³Rintan br Saragih, Universitas Methodist Indonesia

ABSTRAK

Pada saat ini *fraud* masih menjadi masalah yang serius di pemerintahan kabupaten. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan anggaran mulai dari pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana inisiatif anti-*fraud* Pemerintah Kabupaten Samosir dalam kaitannya dengan kompetensi aparatur, budaya organisasi, tata kelola yang baik, dan mekanisme pengendalian internal. Studi ini menggunakan cara kuantitatif penyelidikan penyebab potensial. Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPPD) Kabupaten Samosir pada bulan Maret 2023 menjadi demografi dan sampel penelitian. Kuesioner menjadi sumber data primer, sedangkan laporan realisasi anggaran menjadi data sekunder. Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan bantuan program SPSS 24. Penelitian ini mengkonfirmasi temuan sebelumnya bahwa kompetensi aparatur, budaya organisasi, dan tata kelola yang baik semuanya memiliki peran yang menguntungkan dalam mengurangi terjadinya kecurangan. Sementara itu, tidak ada efek yang dapat diamati dari sistem pengendalian internal terhadap tindakan anti-*fraud*.

Kata Kunci : Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, *Good Governance*, Sistem Pengendalian Internal, *Fraud*

ABSTRACT

District governance is still plagued by widespread fraud. Implementation, administration, accountability, and reporting are only the beginning of the budget management processes where mistakes may occur. The purpose of this study was to analyze how the Samosir Regency Government's anti-fraud initiatives fared in light of apparatus competency, organizational culture, good governance, and internal control mechanisms. This study employs a quantitative way of inquiry into potential causes. Employees of the Samosir Regency Regional Financial and Revenue Management Agency (BKPPD) in March 2023 made up the study's demographic and sample. The questionnaire served as the primary data source, while the budget realization reports provided the secondary data. The data is analyzed using multiple linear regression with the help of SPSS 24. This research confirmed previous findings that apparatus competence, organizational culture, and excellent governance all had a favorable role in reducing the occurrence of fraud. Meanwhile, attempts to avoid fraud are not helped by the internal control system.

Keywords : *Apparatus Competency, Organizational Culture, Good Governance, System Internal Control, Fraud*

I. PENDAHULUAN

Fraud bukanlah fenomena baru yang terjadi di Indonesia. Sejak negara Republik Indonesia merdeka segala bentuk kecurangan sudah banyak terjadi bahkan sebelum negara ini merdeka pun



mungkin sudah banyak kecurangan yang terjadi baik yang terungkap maupun tetap terpendam dan menjadi sebuah rahasia antara beberapa oknum yang terlibat.

Menurut penelitian (Arpani et al., 2022), mengatakan kecurangan ialah segala hal yang dilakukan oleh seseorang baik perorangan maupun kelompok secara sengaja dan dapat menimbulkan kerugian. Dengan adanya kecurangan, masyarakat akan sangat dirugikan dan tentunya juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang akan menghambat kesejahteraan masyarakat serta menghambat adanya pembangunan dalam daerah.

Kabupaten Samosir salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang secara sumber daya alam sangat memiliki potensi untuk dikembangkan namun secara fakta jauh dari harapan. Kabupaten Samosir merupakan salah satu Kabupaten dengan indeks kemiskinan terparah di Provinsi Sumatera. Kabupaten Samosir menduduki posisi ke – 6 pada tahun 2020 dengan indeks keparahan 0,46 dan meningkat di tahun 2021 yakni diposisi ke – 4 setelah Kabupaten Gunung Sitoli dengan indeks keparahan 0,60 (BPS, 2020). Ini merupakan sebuah fenomena yang aneh, dimana potensi alam yang sangat besar dan didukung dengan kontribusi pemerintah pusat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut sementara daerah tersebut masih menduduki 10 besar dengan tingkat kemiskinan terparah.

Jika dilihat dari pendapatan asli daerah Kabupaten Samosir yang terdapat pada laporan realisasi anggaran tahun 2020 dan tahun 2021, pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh Kabupaten Samosir mengalami peningkatan yang sangat minim, yakni dari Rp 60.373.806.629,91 di tahun 2020 (BPK RI, 2020) meningkat menjadi Rp 61.871.566.524,27 di tahun 2021 (BPK RI, 2021). Pendapatan dari pajak dan retribusi daerah pun juga sepertinya tidak ada peningkatan yang signifikan dan dari data yang laporan realisasi anggaran yang telah diaudit oleh BPK tersebut pendapatan pajak dan retribusi daerahnya tampak monoton. Sementara itu, mengingat jumlah hotel dan tempat wisata yang terus meningkat, seharusnya pendapatan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Samosir menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar. Namun, data PAD menunjukkan bahwa meskipun potensi Kabupaten Samosir saat ini, wilayah tersebut dikategorikan sebagai kabupaten miskin. (BPS, 2020).

Fungsi aparatur merupakan faktor yang paling mendasar dalam membentuk kecurangan dalam suatu pemerintahan. Efisiensi peralatan menunjukkan keterampilan yang digunakannya. Kasus yang melibatkan Sekda, mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baru - baru ini menjadi berita utama di Kabupaten Samosir. Ketiganya dituding melanggar ketentuan peraturan bupati dengan mengalihkan dana dari anggaran belanja tak terduga ke belanja langsung tanpa melalui prosedur perubahan aturan yang semestinya (CNN, 2022).

Budaya organisasi ialah salah satu upaya dalam meminimalisir kecurangan. Setiap organisasi tentunya memiliki pedoman, asas, acuan dalam melakukan aktivitas dalam organisasi yang telah disetujui oleh para aparatur untuk dilakukan bersama yang disebut sebagai budaya organisasi (Lorenza et al., 2018). Kabupaten Samosir yang masih merupakan daerah adat sehingga tali kekeluargaan masih terasa sangat erat yang membuat banyak kecurangan - kecurangan yang dinormalisasi karena masih ada tali kekeluargaan. Banyak para wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya atau tidak membayar pajak karena aparatur pajaknya tidak tegas dalam pemungutan pajaknya sementara hotel dan restoran yang ada di daerah tersebut dapat berjalan menghasilkan laba tanpa melakukan pembayaran pajak. Oleh sebab itu pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak belum dilakukan secara optimal. Padahal melihat banyaknya hotel dan restoran di daerah wisata tersebut yang apabila pemungutan pajaknya dilakukan secara optimal akan sangat membangkitkan PAD dari Kabupaten Samosir sendiri. Sama halnya dengan para aparatur yang sering datang terlambat ke kantor, sering mencuri-curi waktu kerja yang digunakan untuk kepentingan pribadi, menggunakan perlengkapan dan peralatan kantor untuk kepentingan pribadi, dan memperpanjang waktu istirahat makan siang merupakan contoh kecil dari kecurangan yang menjadi budaya organisasi tersebut. Wajah dari organisasi dapat dilihat dari budaya kerja dalam organisasi. Pada hal ini aparatur ialah objek nyata dalam suatu organisasi.

Menurut penelitian (Suastawan et al., 2017) mengatakan bahwa pengimplementasian prinsip-prinsip *good governance* juga dapat meningkatkan budaya organisasi. Dengan kata lain budaya organisasi sejalan dengan *good governance*. *Good governance* menjadi salah satu faktor yang dianggap mampu memaksimalkan pencegahan *fraud*.

Keserangan *fraud* terjadi dalam suatu organisasi karena adanya peluang (*opportunity*) yang merupakan titik lemahnya penegakan sistem pengendalian internal. Peluang - peluang tersebut muncul karena lemahnya penegakan hukum di sebuah organisasi sehingga para aparatur yang terlibat terkesan sepele dengan peraturan yang ada. Oleh sebab itu organisasi harus meningkatkan sistem pengendalian internalnya yang membuat para aparatur dapat melaksanakan tugas dan kinerjanya sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku di pemerintahan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kesenjangan yang ditemukan di lapangan, sehingga peneliti memilih kantor Badan Pengelola Pendapatan dan Keuangan Daerah (BKPPD) Kabupaten Samosir sebagai lokasi penelitiannya.

II. KAJIAN PUSTAKA

Teori Agency

Teori *agency* adalah teori yang memaparkan keterkaitan antara pihak agen dan pihak *principal*. Pada penelitian ini yang menjadi pihak agen adalah pemerintah daerah dan *principal* ialah pemerintah pusat dan masyarakat. Jensen dan Meckling secara terpisah mengemukakan gagasan ini pada tahun 1976.

Fraud

Pada dasarnya, penipuan adalah tindakan yang disengaja yang melanggar norma - norma sosial karena secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian moneter kepada orang lain. Penipuan, sebagaimana didefinisikan oleh literatur (Munyati & Jaeni, 2022), adalah penyalahgunaan aset perusahaan yang disengaja untuk keuntungan pribadi atau pemalsuan data dalam penyusunan laporan keuangan palsu.

Kompetensi Aparatur

Salah satu faktor yang diperhitungkan untuk menghindari upaya penipuan adalah keahlian aparatur. Menurut studi, kompetensi profesional tidak secara otomatis muncul dari memiliki informasi yang diperlukan, kemampuan, dan sikap terkait pekerjaan untuk pekerjaan tertentu. Ini termasuk kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan curang. (Wibowo, 2017).

Budaya Organisasi

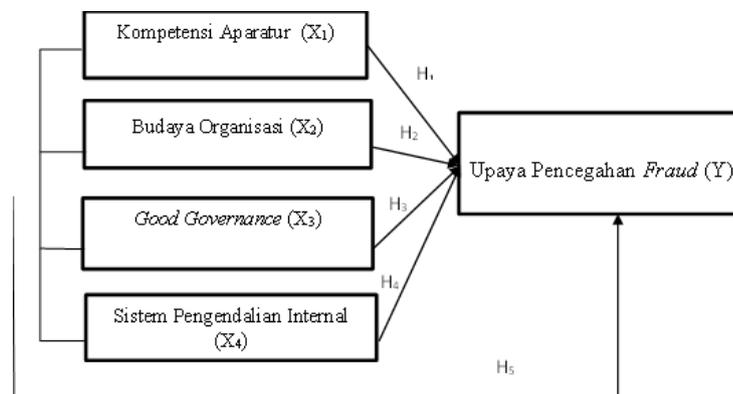
Loyalitas aparatur akan ditentukan oleh budaya organisasi tersebut. Apabila kecurangan sudah menjadi budaya dalam organisasi tersebut maka tingkat loyalitas aparatur kepada organisasi akan minim bahkan tidak ada sama sekali karena aparatur akan berjalan demi kepentingan diri sendiri bukan untuk mencapai kepentingan dari organisasi tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa budaya dapat meningkatkan komitmen organisasi dan berfungsi sebagai identitas organisasi (Sari, 2021)

Good Governance

Menurut penelitian (Yudhasena & Putri, 2019), Untuk mengelola lembaga dengan lebih baik dan memastikan mereka transparan kepada konstituennya, para pendukung konsep "tata kelola yang baik" mengadvokasi pemantauan kinerja pemerintah dan penegakan akuntabilitas pemerintah kepada pemangku kepentingan sesuai dengan kerangka peraturan.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien memastikan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan operasional yang efektif dan efisien, penyusunan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan keamanan nasional, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008.



Gambar 1. Kerangka Kosneptual Penelitian

Perumusan Hipotesis Kompetensi Aparatur Terhadap Upaya Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan teori *agency*, agen dikontrak oleh pihak *principal*, dalam hal ini aparaturn pemerintah daerah adalah sebagai agen dan pemerintah pusat serta masyarakat setempat sebagai pihak *principal*. Pihak *principal* menginginkan pihak agen harus memiliki kompetensi dibidangnya masing - masing , sehingga dengan hal itu dapat mencegah terjadinya *fraud* pada daerah tersebut.

(Wahyuni & Nova, 2019) menemukan bahwa ketika mesin cukup kompeten sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan SOP yang relevan, kecurangan cenderung terjadi. Kompetensi aparaturn berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya pencegahan *fraud*, menurut penelitian (Arpani et al., 2022), (Widyawati et al., 2019), (Wonar et al., 2016), (Huslina et al., 2015) dan (Bernardin & Solihat, 2019). Dari teori *agency* dan penelitian terdahulu maka dapatlah ditarik hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kompetensi aparaturn berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya pencegahan *fraud*.

Budaya Organisasi Terhadap Upaya Pencegahan *Fraud*

Pada teori *agency* menyatakan bahwa *agen* yang kontrak tersebut harus memiliki sikap loyalitas pada organisasi tempat *agen* tersebut bekerja sehingga terbentuk budaya organisasi yang baik di Kabupaten Samosir untuk menjalankan kinerja daripada *agen* sesuai dengan regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pihak *principal* untuk kesejahteraan *principal* serta harus betul - betul membentuk budaya kerja yang baik dan secara tidak langsung akan menjadi identitas dari organisasi tersebut yang membuat kinerja dari pihak *agen* menjadi efektif dan efisien dalam upaya pencegahan *fraud*

Menurut penelitian (Sari, 2021) menyatakan budaya organisasi menentukan perilaku individu dalam organisasi yang akan membentuk sikap serta perilaku anggotanya. Penelitian yang telah dilakukan (Yudhasena & Putri, 2019), (Reni, 2019), (Arifin & Rohman, 2012), (Zelmiyanti & Anita, 2015), (Sudarsana & Budiasih, 2019) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi pemerintah daerah. Dari teori *agency* dan penelitian terdahulu tersebut maka dapat disusun hipotesis berikut:

H2 : Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya pencegahan *fraud*.

Good Governance Terhadap Upaya Pencegahan *Fraud*

Untuk meningkatkan kinerja pejabat pemerintah yang membantu pencegahan penipuan atas nama kepala sekolah, pemerintah daerah, agen dalam teori keagenan, bertindak secara transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Menerapkan tata kelola yang baik telah terbukti mengurangi kecurangan secara signifikan, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian (Sari, 2021). Menurut penelitian (Yudhasena & Putri, 2019), (Pratami & Damayanthi, 2018), (Widasari & Dwija Putri, 2018), (Sunardi et al., 2019), (Astrina,

2016), tata kelola yang efektif berdampak signifikan terhadap keberhasilan upaya untuk menghindari penipuan. Oleh karena itu, asumsi berikut dapat diturunkan dari teori keagenan dan penelitian yang ada:

H3 : *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya pencegahan *fraud*.

Sistem Pengendalian Internal Terhadap Upaya Pencegahan *Fraud*

Dalam teori *agency* bahwa agen yakni pemerintah daerah harus menerapkan sistem pengendalian internal secara maksimal sehingga meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang membantu upaya pencegahan *fraud* yang dapat mensejahterahkan pihak *principal*.

Penerapan pengendalian internal yang sukses akan menghentikan penipuan. Hasil penelitian dari (Sari, 2021), (Rizqia & Widajantie, 2022), (Didi & Kusuma, 2018), (Novita Lorenza et al., 2018), (Yudhasena & Putri, 2019), (Rahman, 2020), (Rohimah & Anna, 2019), (Armelia & Wahyuni, 2020) menyatakan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya pencegahan *fraud*. Maka dari teori *agency* dan penelitian terdahulu tersebut maka dapat disusun hipotesis berikut :

H4 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya pencegahan *fraud*

III. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metodologi penelitian kausal untuk memastikan bagaimana faktor - faktor seperti teknologi pencegahan penipuan, budaya perusahaan, dan struktur tata kelola dapat memengaruhi upaya anti-penipuan. Data primer dikumpulkan melalui pemberian kuesioner, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari laporan rincian belanja APBD Kabupaten Samosir tahun 2020 dan 2021. Anggota staf Badan Pengelola Pendapatan dan Keuangan Daerah (BKPPD) Kabupaten Samosir merupakan populasi sampel penelitian. Ada 96 total.

Dalam penelitian ini digunakan teknik deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data. Jika ada hubungan yang berarti antara variabel yang diteliti, pendekatan ini akan mengungkapkannya. Agar lebih menggambarkan objek penyelidikan dalam kesimpulan akhir. Regresi linier berganda digunakan untuk mengevaluasi hipotesis dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan upaya pencegahan *fraud* sebagai variabel dependen dan kompetensi aparatur, budaya organisasi, tata kelola yang kuat, dan sistem pengendalian internal sebagai variabel independen. Persamaan berikut menjelaskan analisis regresi berganda yang digunakan untuk menguji setiap variabel (Ghozali, 2018):

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y	= <i>Fraud</i>
a	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien regresi dari variabel bebas
X ₁	= Kompetensi Aparatur
X ₂	= Budaya Organisasi
X ₃	= <i>Good Governance</i>
X ₄	= Sistem Pengendalian Internal
e	= error

IV. HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Adapun beberapa tahap yang harus dilakukan dalam analisis regresi linier berganda adalah melakukan uji asumsi klasik. Berikut adalah hasil pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini:

Uji Normalitas



Tabel 1
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.88656530
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.076
	Negative	-.043
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 24, 2023

Hasil temuan pada penelitian ini adalah normal, seperti terlihat pada Tabel 1. Hasil pada penelitian ini normal, sesuai dengan nilai *Asymp Sig (2-tailed)* pada tabel di atas yaitu lebih dari nilai *alpha* 0,05.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a
Collinearity Statistics

Model	Tolerance	VIF
1	KOMPETENSI APARATUR	.384
	BUDAYA ORGANISASI	.312
	GOOD GOVERNANCE	.389
	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL	.300

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 24, 2023

Seperti yang tercantum pada tabel di atas, semua variabel memiliki nilai toleransi lebih dari 0,10 untuk setiap variabel independen dan nilai VIF kurang dari 10,0 yang menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3
Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.012	1.569		1.920	.058
KOMPETENSI APARATUR	.081	.100	.137	.816	.417
BUDAYA ORGANISASI	-.018	.094	-.036	-.190	.850
GOOD GOVERNANCE	.000	.049	.000	.002	.998
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL	-.014	.077	-.034	-.179	.858

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 24, 2023

Hasil uji heteroskedastisitas ditampilkan pada tabel di atas. Berdasarkan hasil pengujian, tidak ada satu pun variabel bebas yang mengalami heteroskedastisitas pada sampel penelitian yang ditunjukkan dengan nilai signifikan $> 0,05$.

Uji F

Tabel 4
Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	6852.030	4	1713.008	68.718	.000 ^b
Residual	2268.459	91	24.928		
Total	9120.490	95			

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 24, 2023

Persamaan regresi yang ditemukan dalam penelitian ini dapat digunakan karena Tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hipotesis uji F diterima berdasarkan tabel ringkasan temuan uji signifikansi.

Uji t

Tabel 5
Uji t

Model	B	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
			Std. Error	Beta		
(Constant)		6.971	2.379		2.930	.004
KOMPETENSI APARATUR		.594	.151	.332	3.932	.000
BUDAYA ORGANISASI		.504	.143	.331	3.534	.001
GOOD GOVERNANCE		.218	.075	.244	2.913	.005
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL		.075	.118	.061	.641	.523

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 24, 2023

Pembahasan

Karena agen, pemerintah daerah dalam hal ini, bertanggung jawab atas semua tugas berdasarkan sistem baik kepada masyarakat maupun pemerintah pusat, maka hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan. Pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya dengan menunjuk aparatur yang memiliki tenaga yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Elemen kemampuan, yang ditunjukkan dalam kinerja dan pelaporan keuangan berkualitas tinggi, dapat membantu menjaga biaya deteksi penipuan seminimal mungkin (Wahyuni & Nova, 2019). Tingkat signifikansi kompetensi aparatur dalam penelitian ini adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dan nilai t_{hitung} sebesar 3,932 yang lebih besar dari t_{tabel} 1,662, sehingga hipotesis H1 diterima. Artinya kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Berdasarkan temuan studi tersebut, Badan Pengelola Pendapatan dan Keuangan Daerah (BKPPD) Kabupaten Samosir dapat meningkatkan sebagian upaya pencegahan kecurangan berkat kompetensi aparaturnya. Signifikansi kompetensi aparatur dalam upaya anti fraud telah ditunjukkan oleh penelitian (Arpani et al., 2022; Huslina et al., 2015; Mada et al., 2017; Widyawati et al., 2019; Wonar et al., 2016).

Menurut teori keagenan, pemerintah kabupaten bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajiban budaya kepada pihak utama, masyarakat atau pemerintah nasional. Sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara, tugas pokok masing-masing dinas di Badan Pengelola

Pendapatan dan Keuangan Daerah (BKPPD) Kabupaten Samosir telah terpenuhi. Se jauh mana budaya mendukung strategi perusahaan dan se jauh mana budaya dapat beradaptasi dan menangani kesulitan lingkungan diperhitungkan oleh akademisi ketika menilai dampak budaya terhadap kinerja organisasi. Hasil penelitian menemukan bahwa Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya pencegahan fraud, dengan tingkat signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, dan nilai t_{hitung} sebesar 3,534 yang lebih besar dari t_{tabel} 1,662 sehingga menerima hipotesis H2. Temuan penelitian menunjukkan bahwa budaya Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (BKPPD) Kabupaten Samosir memiliki pengaruh yang menguntungkan dan substansial terhadap upaya badan untuk memerangi penipuan. Penelitian (Arifin & Rohman, 2012; Novita Lorensa et al., 2018; Reni, 2019; Sari, 2021; Suastawan et al., 2017; Sudarsana & Budiasih, 2019; Yudhasena & Putri, 2019; Zelmiyanti & Anita, 2015) mendukung gagasan bahwa budaya perusahaan memiliki dampak positif pada produktivitas, dan dengan demikian pencegahan penipuan.

Temuan penelitian ini konsisten dengan teori keagenan karena pemerintah kabupaten dalam perannya sebagai agen sudah mempertanggungjawabkan tanggung jawab dan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya oleh pemerintah pusat dan masyarakat, dalam perannya sebagai pihak prinsipal yang dimiliki oleh pemerintah pusat. pemerintah untuk mewujudkan good governance. Gagasan akuntabilitas memastikan bahwa tidak ada karyawan yang melakukan penipuan karena penyaringan ketat yang harus mereka lewati. Aturan dan peraturan berbasis tanggung jawab diketahui dan dipahami oleh semua otoritas. Sejak saat itu, semua mesin dikelola secara adil dan wajar oleh Badan Pengelola Pendapatan dan Keuangan Daerah (BKPPD) Kabupaten Samosir. Hasil penelitian menemukan bahwa good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya pencegahan fraud, dengan tingkat signifikansi untuk variabel sebesar 0,005 (kurang dari 0,05) dan t_{hitung} sebesar 2,913 (lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,662), sehingga menerima hipotesis H3 . Temuan penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelola Pendapatan dan Keuangan Daerah (BKPPD) Kabupaten Samosir memperoleh manfaat dari perbaikan tata kelola dalam beberapa hal. Studi mengkonfirmasi pentingnya tata kelola yang baik dalam inisiatif anti - penipuan. (Astrina, 2016; Damayanti & Primastiwi, 2021; Fauziah, 2016; Isnawati et al., 2022; Sari, 2021; Sunardi et al., 2019; Widasari & Dwija Putri, 2018; Yudhasena & Putri, 2019)

Upaya pemerintah kabupaten untuk mencegah terjadinya kecurangan melalui sistem pengendalian intern belum sepenuhnya terwujud menurut teori keagenan. Sebagai agen, pemerintah kabupaten gagal memberikan justifikasi yang cukup atas kewenangan dan tanggung jawabnya. Khusus di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPPD) Kabupaten Samosir, sistem pengendalian intern OPD telah dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab utama badan tersebut. Senada dengan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah dibentuknya mekanisme pengendalian intern untuk jenjang jabatan. Pelaksanaan sistem pengendalian intern belum optimal karena reaksi masyarakat. Karenanya, menjadi jelas bahwa sistem pengendalian intern BPKPD Kabupaten Samosir tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap upaya pencegahan fraud, dengan tingkat signifikansi variabel ini sebesar 0,523 lebih besar dari 0,05 dan t_{hitung} sebesar 0,641 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,662, mengarahkan para peneliti untuk menolak hipotesis H4. Menurut temuan penelitian, sistem pengendalian internal Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (BKPPD) Kabupaten Samosir hanya sebagian berkontribusi pada upaya badan untuk menghindari penipuan. Sama halnya dengan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti & Primastiwi, 2021; Isnawati et al., 2022; Munyati & Jaeni, 2022; Widhiani, 2021; Wonar et al., 2016) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap upaya pencegahan *fraud*.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsep kompetensi aparatur, budaya organisasi, tata kelola yang baik, dan mekanisme pengendalian internal dalam situasi yang sebenarnya. Penelitian ini



menemukan bahwa inisiatif pencegahan kecurangan diuntungkan secara signifikan oleh peningkatan kompetensi aparatur, budaya organisasi, dan tata kelola yang baik. Sedangkan upaya pencegahan kecurangan tidak dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern. Selain itu, tata kelola yang kuat, budaya perusahaan, dan mekanisme pengendalian internal semuanya memiliki peran dalam mencegah penipuan pada saat yang bersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S., & Rohman, A. (2012). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi dan Komitmen Aparat sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–11.
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sesity terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61. <https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.26125>
- Arpani, M. L., Silfi, A., & Angraini, L. (2022). Pengaruh Whistleblowing System , Kompetensi Aparatur dan Kesadaran Anti Kecurangan Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada OPD Kota Pekanbaru Provinsi Riau). *SYNERGY: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 34– 44.
- Astrina, F. (2016). Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi Dan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi Dengan Pendekatan Balanced Scorecard (Bsc). *Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 7(1), 61–78.
- BPK RI. (2020). Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.
- BPK RI. (2021). Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021.
- BPS. (2020). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota. In Badan Pusat Statistik. <https://bps.go.id/indicator/23/623/1/indeks-keparahan-kemiskinan-p2-menurut-kabupaten-kota.html>
- CNN. (2022). Sekda Kabupaten Samosir Didakwa Korupsi Dana Covid Rp944 Juta. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220407201103-12-781880/sekda-kabupatensamosir-didakwa-korupsi-dana-covid-rp944-juta>
- Damayanti, A. F., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal, Good Corporate Governance, Dan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3(2), 1–14. <https://36.89.54.123/index.php/invoice/article/download/6029/pdf>
- Didi, D., & Kusuma, I. C. (2018). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Pemerintahan Daerah Kota Bogor. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 15(1), 1–20. <https://doi.org/10.21002/jaki.2018.01>
- Fauziah, S. (2016). Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance, Motivasi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahan. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Isnawati, A., Salsabella, A., & Heningtyas, O. S. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Dalam Mencegah Kecurangan Dengan Moderasi Moralitas Individu. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 50–57. <https://doi.org/10.37403/financial.v8i1.386>
- Munyati, F. A., & Jaeni. (2022). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Pemerintah Kabupaten Kudus. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 616–627. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/4389>
- Novita Lorensa, C., Fallah, S., Si, M., & Sanggenafa, M. A. (2018). Pengaruh Budaya Organisasi dan Peran Auditor Internal terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Komponen Struktur Pengendalian Internal Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(2), 13–25.

- Rahman, K. G. (2020). Sistem Pengendalian Internal Dan Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, Vol. 3(No. 1), Hal. 20-27.
- Reni, M. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Administrasi Negara*, 25(1), 72–88. <https://doi.org/10.33509/jan.v25i1.539>
- Rizqia, L., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Keadilan Organisasi, Dan Implementasi Good Governance Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada OPD Kabupaten Jombang. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10), 4637–4647. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1775>
- Rohimah, I., & Anna, Y. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 13(1), 67–76.
- Sari, H. D. D. (2021). Pengaruh Good Governance , Komitmen Organisasi dan Pengawasan Inetrnal Terhadap Kinerja OPD : Budaya Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–25.
- Saragih, R. J. P., Simanjuntak, A., Sembiring, Y. N., & Purba, D. H. P. . (2022). Peran Motivasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Organisasi Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 4(1), 80–109. <https://doi.org/10.36985/jia.v4i1.372>
- Suastawan, I. M. I. D. P., Sujana, E., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Bos (Studi Empiris Pada Sekolah-Sekolah di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/10240>
- Sudarsana, I. N., & Budiasih, I. G. A. . (2019). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Pada Kinerja Keuangan Dengan Penerapan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(1), 78. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i01.p06>
- Sunardi, S., Yanti, D., & Ariansyah, W. (2019). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Akuntabilitas*, 13(2), 155–166. <https://doi.org/10.29259/ja.v13i2.9516>
- Tarigan, V., & Tarigan, W. J. (2020). Analisis Budaya Organisasi Dan Kepuasan Kerja Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Pada Bank Mega Kantor Cabang Pematangsiantar : Analysis Of Organizational Culture And Job Satisfaction That Affect Emoloyee Performance In The Bank Mega Branch Office Trading Siantar. *Jurnal Edueco*, 3(2), 38-50
- Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja (Edisi keli)*.
- Widasari, K. I., & Dwija Putri, I. G. A. M. A. (2018). Pengaruh Good Governance dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1308. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p18>
- Widhiani, T. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada OPD Kabupaten Seruyan).
- Wonar, K., Falah, D. S., & Pangayow, B. J. (2016). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi. <https://Medium.Com/>, 1(November), 63–89. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Yudhasena, I. G. I., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2019). Pengaruh Good Government Governance, Pengendalian Intern, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 434. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p17>
- Zelmiyanti, R., & Anita, L. (2015). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 8(10), 67–76. <http://jurnal.pcr.ac.id>